



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **99.62/PUU/PAN.MK/SP/06/2023**

12 Juni 2023

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023

Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta 10270

Menindaklanjuti perintah Ketua Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, "*Permohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), salinannya disampaikan oleh Mahkamah kepada: a. DPR; b. Presiden; c. DPD; d. MPR; dan e. Mahkamah Agung.*

Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami sampaikan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI salinan permohonan Nomor 62/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 11:00 WIB.

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI diucapkan terima kasih.

**Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Sekretaris Jenderal MPR.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 99.62/PUU/PAN.MK/BASP/06/2023**

Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 11:35 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

